

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pembuatan Akta Perjanjian Kawin di hadapan Notaris baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta istri dalam perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974? 2) bagaimanakah kendala-kendala pelaksanaan perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan solusinya? 3) bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan dengan cara studi pustaka, metode analisa data dengan analisa kualitatif.

Hasil penelitian: 1) perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. 2) Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya itikad baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian kawin. Solusinya, sebaiknya Notaris memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. 3) Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan.

Saran dalam penelitian ini adalah perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, maka sebaik dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Bagi notaris sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Harta istri dalam perkawinan, Notaris*

## ABSTRACT

Marriage is a bond that bore rope family as the basis of the life of society and the State. The marriage contract is an agreement between the prospective husband or wife, to arrange a marriage due to their wealth. Making the Marriage Deed before the Notary both before and after the enactment of Law No. 1 of 1974 on the possible marriage of the parties to the contrary regarding marital property management currently carried out by making the marriage contract.

The problem in this research are: 1) What is the legal protection of property mating wife in agreement Notary before and after the enactment of Law No. 1 of 1974? 2) how the implementation constraints mating agreement made before a notary public before and after the enactment of Law No. 1 of 1974 and the solution? 3) how the authority and responsibility of the notary in the deed of the marriage covenant made before and after the enactment of Law No. 1 of 1974?

The method used in this research is empirical juridical approach, this research Specification is a descriptive analysis, data sources are primary data and secondary data collection methods used by means of literature, methods of data analysis with qualitative analysis.

Results of the study: 1) the legal protection of property in the marriage contract can only be done when the mating holding of marriage. In accordance with Article 1338 of the Civil Code and the Marriage Law Article 29 of the agreement must be made in good faith by taking into account the provisions of the law, religion, norms of morality and public order. 2) Obstacles in the implementation of the agreement to marry in the absence of good faith of the parties and the exclusion of the rights and obligations in the agreement to marry. The solution, preferably Notary ensures that the deed has been registered at the office that made the authorities so that the deed had made confirmed as authentic act so as not to harm the party. 3) The powers and responsibilities of a notary in the deed that is made is the extent of the agreement that has met syarat-syarat validity of agreements pursuant to Article 1320 of the Civil Code, then he can not be prosecuted in court.

Suggestions in this study was the mating agreement basically adhere to the principle of freedom of the parties, as well as the choice of law clause included in the marital property dispute resolution. For notary should ensure that the deed has been registered at the office who made the authorities to deed made only as a deed of agreement under hand.

Keywords: *Legal Protection, Hidden wife in marriage, Notary*